

MANAJEMEN MUTU PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA

Bunyamin

Alamsyah

STAI Pangeran Dharma Kusuma Segeran Indramayu-Jawa Barat

Jln. K H. Hasyim Asy-ari No. 1/1 Segeran Kidul Juntinyuat Indramayu 45282

Email: bencocom@yahoo.co.id

ABSTRAK

Tulisan ini bermaksud mendeskripsikan kemungkinan penerapan manajemen mutu yang berkualitas bagi eksistensi sebuah perguruan tinggi di Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS) di Indonesia. Metode pembahasan yang digunakan adalah analisis konten. Teori yang digunakan adalah teori manajemen mutu terpadu (*Total Quality Management*) yang diramu dengan kondisi kelembagaan PTAIS. Hasil kajian menunjukkan bahwa strategi pengembangan mutu sistem Pendidikan Tinggi Islam Swasta setidaknya harus; 1) berorientasi pada pengembangan mutu akademik berskala internasional, sehingga *academic and social needs* untuk skala nasional dan regional sudah secara otomatis mampu dipenuhi; 2) didukung oleh *good academic atmosphere* sehingga upaya peningkatan mutu akademik dapat berjalan lebih cepat dan efektif; 3) menjadi *primary supporting* dalam rangka internasionalisasi pendidikan Islam yang lebih humanis dan menjalin *international academic networking* yang luas untuk mendukung SDM dalam negeri menjadi lebih unggul, inovatif dan produktif.

Kata Kunci : Manajemen Mutu, Perguruan Tinggi Agama Islam, Swasta, Sumber Daya Manusia

ABSTRACT

This paper is intended to describe the Possibility to apply quality management in Private Islamic University (PTAIS) in Indonesia. The method used to analysed this is content analysis. The theory used is the theory of total quality management (TQM) which is adapted with PTAIS institutional conditions. The findings showed that The strategy to develop the quality of Private islamic Universities should be, at least: 1) directed to The development of academic quality based on internaitonal standard, so that the academic and social needs for national and regional scale is automatically able to be met, 2) supported by a good academic atmosphere so that attempts to improve the academic quality can be run more quickly and effectively; 3) the primary support to the internationalization of Islamic education which is more humane; and establish broad international academic networking to support the human resources quality which is more superior, innovative, and productive.

Keywords: Quality Management, Islamic University, Private, Human Resources.

PENDAHULUAN

Era globalisasi adalah era persaingan mutu atau kualitas. Maka perguruan tinggi di era globalisasi hendaknya berbasis pada mutu. Dalam menyediakan jasa pendidikan dan mengembangkan sumber daya manusia, perguruan tinggi hendaknya memperhatikan bahwa keunggulan merupakan hal yang sangat penting saat ini. Para mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di perguruan tinggi pada dasarnya mengharapkan hasil berlipat/ganda yaitu ilmu pengetahuan, gelar, keterampilan, pengalaman, keyakinan dan perilaku berbudi luhur. Semua itu diperlukan dalam rangka mempersiapkan diri memasuki/membuka lapangan kerja dengan mengharapkan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera secara lahir dan batin (Sufyarma, 2004: 161).

Derasnya arus globalisasi pada milenium ketiga ini membuat banyak perguruan tinggi terutama Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) di Indonesia acapkali kesulitan untuk bersaing, berkompetisi dan mengikuti perkembangan zaman, terlebih Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS). PTAIS secara kualitas, masih jauh dari harapan bahkan banyak di antara mereka yang bernasib mengenaskan, yaitu 'gulung tikar.

Secara umum, terdapat kesenjangan pencitraan yang terlalu jauh antara PTAIN dengan PTAIS. PTAIN identik dengan perguruan tinggi yang besar dan bermutu lebih baik daripada PTAIS. Kondisi ini membuat masyarakat lebih memercayai PTAIN daripada PTAIS. Ini merupakan stereotipe dari keberpihakan masyarakat terhadap perguruan tinggi negeri umum, misalnya ITB, UI, UGM dan IPB daripada perguruan tinggi swasta seperti Universitas Trisakti, Atma Jaya, Universitas Parahyangan dan Universitas Muhammadiyah Malang, meskipun pada beberapa segi mereka memiliki kualitas yang setara dengan universitas negeri bahkan boleh jadi melebihinya. Uang SPP (sumbangan pendidikan) pun kadangkala tidak jauh berbeda. Dampak dari pencitraan tersebut, *row out put* pada perguruan tinggi swasta menjadi kurang bagus. Hal tersebut membuat perguruan tinggi swasta bekerja lebih keras lagi untuk menjaring calon mahasiswa yang berkualitas agar masuk universitas swasta. Dalam konteks pendidikan Islam pun sama. PTAIS (masyarakat muslim Indonesia) hendaknya lebih bersemangat lagi dalam menjaring calon mahasiswa yang berkualitas. Bagaimanapun juga mengembalikan *the golden age of Islam* di Indonesia bukan hanya tanggung jawab PTAIN tetapi merupakan tanggung jawab bersama baik pemerintah maupun masyarakat (PTAIS) (Mas'ud, 2001: 13).

Secara umum, PTAI masih kalah bersaing dalam menghasilkan *out put* yang siap dipakai. Tiap tahunnya, hampir 43% lulusan PTAI tidak terserap ke dalam dunia kerja, baik di sektor publik maupun non publik (Ahmad Rivan, 2005). Kondisi ini digambarkan oleh Mark Haynes Daniel (2002: 34) sebagai *scary but true*, menakutkan tetapi benar. Setelah beberapa IAIN berubah menjadi UIN, harapan untuk menghindari ramalan Daniel agak terbuka. Kini,

UIN tidak lagi memandang secara terpisah/dualisme tentang ilmu. Bagi UIN tidak ada lagi pemisahan/keberpihakan secara teologis antara ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pengetahuan agama. Kedua ilmu tersebut pada dasarnya sama. Oleh karena itu, harus diperlakukan sama yaitu wajib dipelajari. Masyarakat abad 21 cenderung mengarah pada pembentukan masyarakat yang menguasai ilmu pengetahuan (*knowledge society*) tanpa harus kehilangan nilai-nilai agama.

Hal yang masih mencemaskan adalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) PTAI masih rendah. Secara umum, ini dampak dari rendahnya kualitas SDM Indonesia. Data yang dipublikasikan oleh *United Nations Development Program* (UNDP) menunjukkan bahwa pada tahun 1996, kualitas SDM Indonesia berada pada peringkat 102 dari 174 negara di dunia, bahkan pada tahun 2007, Indonesia berada di posisi 112, di bawah Malaysia (61), Thailand (73), Filipina (84) dan Vietnam (108). Laporan UNDP yang memuat angka indeks kualitas SDM (*Human Development Index*-HDI) tersebut mencakup tiga hal; tingkat pendidikan, kesehatan serta ekonomi rata-rata masyarakat (Suyanto dan Hisyam, 2000: 4). Dengan demikian, pendidikan selain sebagai korban juga sebagai penyebab rendahnya mutu SDM.

Dalam konteks PTAIS, laporan di atas dijadikan motivasi untuk segera membenahi kondisi pendidikan tinggi Islam, terutama yang berstatus swasta. Bagaimanapun juga, di abad 21 ini, eksis tidaknya suatu perguruan tinggi, bergantung pada kesiapan lulusan dan lembaganya untuk bersaing di tengah masyarakat yang penuh dengan kompetisi (mega-kompetisi) dan memiliki kesadaran global (*global consciousness*). Oleh karena itu, pembenahan pendidikan tinggi Islam terutama PTAIS menjadi suatu tuntutan yang mutlak untuk dilakukan agar terjadi perubahan kualitas serta terus eksis sebagai lembaga pendidikan yang disegani baik di masa kini dan terutama di masa yang akan datang. Kennedy mengatakan, "*Change is a way of life. Those who look to the past or present will miss the future.*" Perubahan adalah hal yang niscaya maka dalam melakukan reformasi pendidikan harus berpegang pada tantangan masa depan yang penuh dengan persaingan global agar mampu berkompetisi secara baik, bukan bernostalgia atas masa silam (Suyanto dan Hisyam, 2000: 22).

Saat ini, Perguruan Tinggi Agama Islam, sebagai wadah untuk mendidik dan membina kader-kader pemimpin Agama dan Bangsa memerlukan suatu cara pengelolaan yang baru dan berbeda dengan pengelolaan instansi non pendidikan pada umumnya. Lembaga pendidikan adalah lembaga akademik bukan lembaga kantor. Oleh karena itu, tata kelola/manajemen yang digunakan oleh perguruan tinggi berbeda dengan manajemen yang digunakan di perkantoran biasa. Manajemen yang digunakan di perguruan tinggi diatur selain harus rapi, efisien dan transparan juga harus berorientasi pada pemenuhan kebutuhan akademik, seperti adanya prioritas untuk mengembangkan ilmu pengetahuan (Sufyarma, 2004: 190).

Secara normatif, peraturan-peraturan akademik dan administrasi mempunyai tata kerja yang dapat membentuk suatu sistem tertentu yang harus ditaati dengan penuh disiplin dan dedikasi dari semua pihak. Dengan sistem seperti ini maka ada jaminan penuh bahwa perguruan tinggi akan berkembang ke arah yang sudah ditentukan walaupun sering berganti pimpinan. Prasarana dan sarana akademik harus diprioritaskan daripada sarana dan prasarana non akademik, seperti perpustakaan, laboratorium, internet, *note book* dan buku-buku yang sangat dibutuhkan oleh para tenaga pengajar agar senantiasa meningkatkan kualitas dan profesionalitasnya (Fadjar, 2005: 284).

Tulisan ini bermaksud mendiskusikan tentang penerapan manajemen mutu di Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS) agar kualitas lembaga tersebut terjamin dan lulusannya mampu bersaing dengan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri bahkan dengan perguruan tinggi pada umumnya. Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan adalah manajemen pendidikan Islam (MPI), khususnya bidang manajemen mutu pendidikan tinggi.

PEMBAHASAN

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU No 20/2003) pasal 1 ayat 1, dinyatakan bahwa "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara".

Pada pasal (19) ditegaskan bahwa pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Pada pasal 24 ayat (2) berbunyi bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat. Berkenaan dengan pendanaan, ayat (3) berbunyi bahwa perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik.

Penyelenggaraan pendidikan tinggi, seperti halnya pendidikan dasar dan menengah, menurut undang-undang merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua dan masyarakat. Ini artinya, masyarakat memiliki hak untuk mendirikan dan mengelola perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peluang ini dimanfaatkan betul oleh masyarakat sehingga perguruan tinggi swasta didirikan di mana-mana. Seiring dengan kebebasan perguruan tinggi negeri membuka berbagai jurusan dan program studi, keberadaan perguruan tinggi swasta semakin terancam. Perguruan tinggi semakin memiliki sedikit

kesempatan untuk membuka prodi dan fakultas baru. Dampaknya banyak perguruan tinggi swasta yang gulung tikar karena tidak mampu bersaing memperebutkan mahasiswa.

Hakikat undang-undang di atas, mengandung pengertian bahwa ada sejumlah aspek penting yang harus diperhatikan dalam pendidikan yaitu; *cognitive*, *affective* dan *psychomotor*. Dengan kata lain program pendidikan tidak hanya menekankan pada aspek pengetahuan (*cognitive*) saja tetapi juga menekankan pada pembinaan sikap dan pengembangan keterampilan peserta didik. Oleh karena itu perguruan tinggi hendaknya menjadi institusi yang tidak hanya didominasi oleh pendidikan dan penelitian saja tapi juga seharusnya menjadi lembaga yang dapat membina sikap terpuji atas sivitas akademiknya yaitu sikap menghindari tindakan kekerasan (*violence*) seperti aksi pemukulan atau penganiayaan dan tindakan ketidakjujuran akademis (*academic dishonesty*) seperti kasus penjiplakan (*plagiarism*), perjokian, dan menyontek (*cheating*).

Secara umum pendidikan tinggi terdiri atas dua jalur yaitu jalur akademik dan jalur kejuruan (vokasi). Jalur akademik adalah universitas, institut dan sekolah tinggi yang menawarkan stratafikasi gelar akademik dan spesialis (*higher degrees and specialist*) dan mencakup program pendidikan S1 (gelar sarjana), S2 (gelar Magister), Spesialis dan S3 (gelar Doktor). Sedangkan Jalur kejuruan atau vokasi, umumnya menawarkan pendidikan kejuruan (*vocational education*) setingkat program diploma (ahli Madya). Pendidikan ini umumnya diselenggarakan oleh semua akademi yang ada di Indonesia.

Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAIS) pada dasarnya merupakan lembaga pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang bertujuan menghasilkan ahli-ahli agama Islam yang bermutu dan bermanfaat bagi masyarakat serta untuk mengembangkan ilmu, teknologi dan budaya Islam guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat serta memperkaya kebudayaan nasional (Furchan, et.a 2005: 6).

Upaya pembelajaran di PTAIS sendiri telah berlangsung sejak dibukanya Sekolah Tinggi Islam (STI) di Jakarta pada bulan Juli 1945 menjelang Indonesia merdeka. Sejak itu telah terjadi dinamika dan perkembangan pendidikan tinggi Islam di Indonesia berawal dari lahirnya STI yang kemudian berubah menjadi Universitas Islam Indonesia (UII) di Yogyakarta (Daulay, 2004: 133).

Perubahan STI menjadi UII terjadi pada tahun 1948, saat itu UII memiliki lima fakultas. Kemudian salah satu fakultas pada UII, yaitu Fakultas Agama diserahkan kepada pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama yang kemudian dijadikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) dengan PP Nomor 34 Tahun 1950 dan ditandatangani oleh Presiden I tertanggal 14 Agustus 1950. Menurut pasal 2 dari PP Nomor 34 Tahun 1950 tersebut, dijelaskan bahwa Perguruan Tinggi Agama Islam bertujuan memberikan pelajaran tinggi dan menjadi pusat penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan tentang agama Islam (Yunus, 1979: 396).

Di Indonesia, selain terdapat Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) juga terdapat Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS) yang jumlahnya jauh lebih banyak. Saat ini, perguruan tinggi Islam swasta, baik yang berbentuk universitas, institut ataupun yang lainnya telah berkembang dengan pesat. Perkembangan ini tidak hanya terlihat dari jumlah lembaga, tetapi juga terdapat pada jumlah jurusan dan program studi yang ditawarkan. Untuk itu pemerintah membuat kebijakan tentang PTAIS bahwa program studi dan fakultas-fakultas keagamaan berada di bawah pengawasan Kopertais (Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta) sedangkan untuk fakultas non keagamaan berada di bawah wewenang Kopertis (Koordinator Perguruan Tinggi Swasta) (Daulay, 2007: 141).

Secara historis, Perguruan Tinggi Agama Islam dalam konteks pemberdayaan umat Islam di Indonesia memiliki peran yang sangat urgen, baik secara struktural maupun kultural sejak dari masa penjajahan, kemerdekaan hingga saat ini. Azyumardi Azra (2000: 51) mengemukakan bahwa setidaknya ada dua peran strategis PTAI di Indonesia. *Pertama*, peran struktur organisasional. Peran ini berfungsi membentuk dan menciptakan kader-kader akademis-intelektual muslim masa depan yang diharapkan mampu menjadi lokomotif pembaruan pemikiran keislaman Indonesia ke arah modernisasi perangkat-perangkat infrastruktur pendidikan Islam di masyarakat. Fungsi ini, banyak diperankan oleh lembaga pendidikan tinggi Islam baik swasta maupun negeri. Dengan adanya peran itu, masyarakat memiliki *academic consciousness* sehingga mampu memosisikan dirinya dalam perhelatan sosial politik keagamaan secara moderat. *Kedua*, peran sosial dan kultural. Peran ini oleh PTAI dimediasi melalui gerakan pengabdian dan *social research* dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Peran ini juga tidak kalah penting, karena dengan pendekatan itu PTAI mampu menjalin *social network* dengan masyarakat sebagai salah satu *stakeholder* serta mendorong tumbuhnya *social confidence* dan *spirit of ethics otonomy* masyarakat yang bertumpu pada *Islamic morality values* sehingga mampu menciptakan tatanan masyarakat yang beradab, sehingga wajar jika kemudian Indonesia menjadi *center of Islamic episentrum* negara muslim dunia, atau menurut Daniel S. Live (Mastuhu, 2004: 25), *Indonesia is the most moderate countries* yang tidak hanya kokoh akan tradisi multikulturalismenya, tetapi juga memiliki komitmen yang tinggi akan tradisi keislamaannya. Wajar jika kemudian Barat lebih berkiblat ke Indonesia dalam konteks kajian keislaman. *Ketiga*, secara spiritual, PTAI juga berperan dalam membentuk masyarakat agar memiliki kesadaran keagamaan (*religious consciousness*). Agama menjadi *platform of human life* agar manusia tidak terasing dengan lingkungan dan Tuhannya. Peran spiritual ini menjadi penting terutama dalam mengarungi fase era globalisasi dan liberalisasi, yang oleh Zukav (1991: 125) disebutnya sebagai era *blind of materialism* (segala sesuatu banyak diukur oleh materi tanpa memperhitungkan kondisi psikologis manusia). Dampaknya banyak manusia yang mengalami

stres dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam hal pendidikan. Hasil penelitian *Straith Time*, pada tahun 2003, ada 5% anak Singapura menderita stres berat sebagai implikasi dari globalisasi pendidikan.

Upaya pembenahan kualitas PTAI terutama PTAIS menjadi tanggung jawab bersama, namun akan menjadi suatu kebanggaan bagi umat Islam Indonesia apabila mampu memberi kontribusi yang signifikan bagi peningkatan mutu pendidikan di negeri ini, sebagaimana tercatat dalam sejarah kebangsaan Indonesia, PTAI telah berperan besar dalam meningkatkan kehidupan intelektual, kultural dan sosial bangsa Indonesia. Menurut Tilaar (2001: 83), upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, tidak bisa mengabaikan eksistensi dan keikutsertaan PTAI sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi Islam. Fakta itu ditunjukkan dengan angka partisipasi PTAI dari tahun ke tahun yang semakin besar. Pada tahun 1993, jika angka partisipasi pendidikan tinggi nasional itu 8.5% dengan jumlah mahasiswa 1,6 juta, maka pada akhir tahun 1994 angka partisipasi itu meningkat menjadi 11.00 % dengan jumlah mahasiswa sekitar 2.5 juta. Sebagian besar kenaikan jumlah mahasiswa itu ditampung oleh PTAIS. Hal ini menunjukkan betapa besar peran PTAI dalam membantu meningkatkan kualitas SDM di negeri ini.

Terlepas dari berbagai kelemahan yang ada, kenyataan tersebut menegaskan betapa besar peran PTAI di Indonesia. Oleh karena itu, sudah menjadi suatu keharusan bagaimana PTAI di Indonesia tanpa bernostalgia dengan historisitas peran strategis yang telah diberikan bagi pengembangan dan kemajuan negara ini untuk terus melakukan pembenahan secara simultan, dan kontinyu untuk menjadi lebih baik sehingga ke depan dapat lebih meneguhkan jati dirinya sebagai kawah candradimuka pemberdayaan umat Islam Indonesia sekaligus mempertajam orientasi peran futuristiknya bagi generasi yang akan datang sehingga akan lebih akomodatif dan adaptif terhadap berbagai persoalan keumatan di era globalisasi dan internasionalisasi pendidikan. Tanpa didukung adanya *internal conciousness for improvement* untuk terus eksis, maka tidak mungkin PTAI di Indonesia dapat melanjutkan kiprah strategisnya di masa-masa yang akan datang baik di tingkat nasional maupun internasional.

Internasionalisasi pendidikan dalam konteks globalisasi sejatinya merupakan akselerasi percepatan dunia di bidang pendidikan, termasuk pada PTAIS. Di satu sisi, internasionalisasi mampu menawarkan beribu wajah impian akan kesuksesan, tetapi di sisi lain juga tak kalah mengerikannya, menggulung siapapun ke dalam jurang kehancuran. Internasionalisasi, kata Stiglitz (Daniel, 2002: 45) adalah *fundamentalism globalization*, yang menyediakan peluang sekaligus ancaman untuk meraih kemajuan sekaligus keterpurukan. Dengan instrumen pasar bebas, internasionalisasi akan menjadi suatu keniscayaan yang tidak menutup kemungkinan untuk terjadi, termasuk dalam dunia pendidikan tinggi yang pada dasarnya merupakan

embrio dari arus internasionalisasi ilmu pengetahuan, seni dan budaya yang berjalan tanpa batas (*borderless higher education market*).

Internasionalisasi pendidikan pada dasarnya disebabkan oleh empat faktor utama yaitu; (1) perhatian pemerintah suatu negara terhadap bidang pendidikan yang masih rendah, (2) keterbatasan dana yang dimiliki negara-negara berkembang, (3) peningkatan permintaan akan pendidikan tinggi yang bermutu, serta (4) kemajuan teknologi informasi. Oleh karena itu, dapat dimaklumi ketika Indonesia menjadi incaran negara eksportir jasa pendidikan, karena Indonesia dengan jumlah penduduk kurang lebih 210 juta hanya mampu memiliki tingkat partisipasi pendidikan tinggi sebesar 14% dari jumlah penduduk usia 19-24 tahun.

Seiring dengan kenyataan itu, pendidikan pada fase selanjutnya menjadi salah satu komoditi internasional WTO yang sangat potensial melalui aplikasi *General Agreement on Trade in Services* (GATS) di samping sektor kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi. Bagi negara maju, liberalisasi pendidikan dengan wajah internasionalisasi merupakan lahan subur yang mampu menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Sejak medium 1980, di negara-negara maju, perdagangan jasa pendidikan tumbuh pesat dan telah memberikan sumbangan yang besar dibandingkan dengan sektor primer dan sekunder. Tiga negara yang paling banyak mendapatkan keuntungan itu adalah Amerika Serikat, Inggris dan Australia. Oleh karena itu dapat dipahami mengapa negara-negara maju begitu getol menyerukan internasionalisasi pendidikan melalui WTO. Betapa tidak, bagi Australia misalnya, sektor itu, mampu menyumbangkan 20% pada PDB Australia, menyerap 80% tenaga kerja dan merupakan 20% dari ekspor total Negeri Kanguru tersebut (Mc Rae, 2003: 43).

Dalam konteks itu, tidak menutup kemungkinan pendidikan tinggi Islam akan menjadi salah satu komoditi kompetitif dari internasionalisasi pendidikan, manakala PTAIS di Indonesia mampu mendesain pendidikan tingginya sejajar dengan kebutuhan dan standar internasional. Namun, untuk menuju ke arah itu, PTAIS di Indonesia perlu bersikap ekstra hati-hati (antisipatif) dan melakukan persiapan guna menyongsong era itu secara bertahap, baik dalam skala internal PTAIS yang bersangkutan maupun dalam dataran pemerintah selaku pengambil kebijakan pendidikan nasional. Sikap ini dimaksudkan agar perguruan tinggi di Indonesia termasuk PTAIS tidak akan hanyut ke dalam arus hitam globalisasi pendidikan (*culture shock*) sebagai dampak negatif dari globalisasi dan liberalisasi pendidikan yang mengorbankan kepentingan agama dan bangsa. Sebaliknya, globalisasi hendaknya dapat membawa PTAIS Indonesia lebih dapat memberikan kontribusi terhadap negara Indonesia sebagaimana yang telah diraih oleh negara-negara maju, termasuk dalam hal ini memperbaiki daya saing/kualitas tenaga kerja Indonesia di level manca negara menjadi lebih kompetitif dan produktif.

**Kualitas Sistem Pendidikan dan Daya Saing Tenaga Kerja
pada 12 Negara di Asia**

Negara	Skor	Negara	Skor
1. Korea Selatan	3.09	7. Malaysia	4.41
2. Singapura	3.19	8. Hongkong	4.72
3. Jepang	3.50	9. Philipina	5.47
4. Taiwan	3.96	10. Thailand	5.96
5. India	4.24	11. Vietnam	6.21
6. Cina	4.27	12. Indonesia	6.56

Sumber: Mulyasa 2007.

Daya saing SDM Indonesia sangat lemah bila dibandingkan dengan tenaga kerja dari negara-negara Asia lainnya. Indonesia bahkan berada di bawah Thailand dan Vietnam yang dalam beberapa dasawarsa yang lalu, justru kedua negara itu banyak belajar dari Indonesia dalam hal pendidikan. Malaysia bahkan mampu tampil memosisikan dirinya di atas Hongkong dan Philipina. Kenyataan ini semakin menegaskan betapa rendahnya mutu sistem pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, PTAIS melalui pendidikan tinggi Islam sudah saatnya melakukan pembenahan secara serius bila ingin memberikan kontribusi yang signifikan kepada negara ini, sekaligus mempertegas eksistensinya sebagai salah satu perguruan tinggi nasional alternatif yang terbaik di Indonesia yang juga mampu bersaing di berbagai level kompetisi, baik nasional, regional maupun internasional.

Perguruan tinggi merupakan wahana tenaga ahli yang diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan memberi sumbangan kepada pembangunan. Sebagai usaha sistematis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia maka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan empat kebijakan pokok dalam bidang pendidikan yaitu pemerataan dan kesempatan, relevansi pendidikan dengan pembangunan, kualitas pendidikan dan efisiensi pendidikan. Khusus untuk perguruan tinggi akan lebih diutamakan membahas mengenai relevansi pendidikan dengan pembangunan yang dalam langkah pelaksanaannya dikenal dengan keterkaitan dan kesepadanan (*link and match*) (Fadjar, 2005: 286).

Hanya dengan pengetahuan yang mendalam tentang apa yang dibutuhkan pembangunan tersebut, pendidikan akan dapat lebih mencapai hasil sesuai dengan misi dan fungsinya. Upaya menciptakan keterkaitan dan kesepadanan tersebut mengacu pada Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi kegiatan-kegiatan pendidikan (proses belajar mengajar), penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam Dharma Pendidikan, perlu dievaluasi relevansi program dan jurusan yang ada dalam kebutuhan

pembangunan, dalam arti apakah sumber daya manusia yang dihasilkan dapat diserap oleh kegiatan perekonomian dan pembangunan.

Pertama, mengenal adanya *raw-input* dan *instrumental-input*. *Raw input* merupakan peserta didik sedangkan *instrumental-input* terdiri dari: gedung, perpustakaan, pedoman akademik, dosen, kurikulum dan metode; *kedua*, *raw-input* dan *instrumental-input* masuk dalam proses, yang ini akan memakan waktu delapan (8) semester; *ketiga*, *output* (hasil didik) yang sesuai dengan kriteria institusi dan siap untuk masuk ke dalam persaingan global. Dosen merupakan instrumen yang sangat menentukan keberhasilan proses pendidikan, karena dari dosenlah perpindahan ilmu dilakukan kepada mahasiswa (Azra, 2002: 29-37).

Perguruan tinggi yang memiliki tenaga-tenaga dosen yang berkualitas akan banyak diminati oleh masyarakat. Karena itu, program untuk meningkatkan kualitas para dosen merupakan kewajiban yang tidak ditawar-tawar lagi pada saat ini dan di masa mendatang. Perguruan tinggi yang tidak mau mengikuti arusnya perkembangan perubahan sekarang dan di masa datang akan ditinggalkan oleh masyarakat dan lambat atau cepat akan mengalami kemunduran, yang akhirnya akan mengalami keruntuhan. Di sisi lain, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi.

Kurikulum dibagi dalam kurikulum inti dan kurikulum lokal. Kurikulum inti adalah bagian dari kurikulum pendidikan tinggi yang berlaku secara nasional untuk setiap program studi, yang memuat tujuan pendidikan, isi pengetahuan, dan kemampuan minimal yang harus dicapai peserta didik, dalam penyelesaian suatu program studi. Di sisi lain, kurikulum lokal adalah bagian dari kurikulum pendidikan tinggi yang berkenaan dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan (Sufyarma, 2004: 144).

Strategi Mengembangkan Mutu PTAIS di Indonesia

Mutu merupakan bagian dari bentuk penjabaran strategi pengembangan PTAIS yang utamanya melakukan perbaikan manajemen mutu sistem pendidikan tinggi Islam di PTAIS. Sallis (2001: 53-55) menegaskan bahwa manajemen mutu pendidikan akan sangat membantu institusi pendidikan, setidaknya untuk tiga hal penting; *pertama*, manajemen mutu akan memperkuat sistem pengelolaan perguruan tinggi menjadi lebih baik. Maka dengan diterapkannya manajemen mutu, kualitas PTAIS akan menjadi lebih baik. *Kedua*, dengan manajemen mutu, PTAIS akan mampu menghasilkan produk pendidikan tinggi Islam Swasta yang lebih unggul dan kompetitif. *Ketiga*, dengan manajemen mutu, PTAIS di Indonesia akan lebih *established* dalam menjalani kompetisi dengan pendidikan tinggi lain baik

swasta maupun negeri, baik dalam skala nasional, regional maupun internasional.

Mutu dalam konteks PTAIS juga mendorong otonomi perguruan tinggi swasta. Otonomi penyelenggaraan perguruan tinggi swasta awalnya berhubungan dengan kebijakan pemerintah/negara tentang jaminan atas kemandirian perguruan tinggi. Hubungan ini harus berlandaskan pada prinsip kebebasan akademik dan kemandirian kelembagaan. Kemandirian tersebut diperlukan dalam rangka mendorong kreativitas dan kebebasan mengelola dirinya sendiri. Posisi pemerintah pusat hanya menjadikan dirinya sebagai fasilitator melalui sejumlah kebijakan yang bersifat makro agar perguruan tinggi swasta lebih mandiri termasuk PTAIS.

Pelaksanaan otonomi perguruan tinggi mempunyai konsekuensi/resiko yang besar terutama pada pembiayaan. Agar otonomi perguruan tinggi mempunyai makna bagi kemajuan bangsa dan masyarakat, maka kebijakan tersebut harus berhubungan erat dengan penjaminan mutu atas proses belajar mengajar dan produknya, juga harus meningkatkan akuntabilitas lembaga perguruan tinggi swasta tersebut kepada *stakeholders*. Untuk itu, evaluasi hendaknya terus-menerus dilakukan baik secara internal maupun oleh lembaga akreditasi yang independen.

Dalam rangka mewujudkan sasaran di atas, diperlukan kerja sama melalui lebih banyak pembentukan asosiasi perguruan tinggi swasta dan jejering lainnya. Jejaring antar perguruan tinggi swasta di bawah koordinasi sebuah asosiasi akan sangat membantu dalam mengatasi kekurangan lembaga pendidikan tinggi baik dalam hal pengadaan *software*, *hardware* maupun *brainware*.

Otonomi perguruan tinggi juga berhubungan dengan kewenangan kelembagaan dalam menentukan tujuan dan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat termasuk dengan kewenangan kelembagaan untuk menggunakan cara-cara tertentu dalam mencapai tujuan tersebut. Bidang otonomisasi perguruan tinggi yang paling hakiki adalah kebebasan akademik. Ia berupa kebebasan dosen dan ilmuwan secara personal dalam mencari dan mencapai kebenaran melalui pengajaran dan penelitian tanpa rasa takut atas hukuman maupun tindakan-tindakan administratif.

Jika manajemen penjaminan mutu dijalankan dengan baik maka *greater autonomy* bagi perguruan tinggi swasta terutama bagi PTAIS akan lebih bermakna. Keberadaan lembaga penjaminan mutu di PTAIS tidak akan hanya menjadi papan nama/formalitas saja tetapi betul-betul berfungsi sesuai dengan tugas dan perannya. Lembaga penjaminan mutu yang aktif akan berusaha mewujudkan *greater responsibility*, *greater quality assurance* dan *greater accountability* bagi lembaganya bukan cenderung mencari kesalahan-kesalahan orang lain di lingkungan lembaganya. *Greater autonomy* pun ketika dilaksanakan dengan efektif dan efisien akan berdampak pada pengembangan program studi dan kurikulum yang mencerminkan kebutuhan masyarakat. *Greater responsibility*, berarti PTAIS harus bertanggungjawab kepada semua *stakeholders* dan *customer* (mewakili seluruh

masysarakat) tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. *Greater quality assurance* berarti PTAIS harus bisa memberikan jaminan lebih nyata terhadap kualitas proses, produk dan jasa baik melalui evaluasi internal maupun eksternal baik oleh badan independen luar negeri maupun dalam negeri (seperti BAN-PT). Evaluasi bahkan dapat dilakukan oleh Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta sendiri melalui sertifikasi internal. *Greater Accountabibty* terutama berhubungan dengan pengembangan ilmu, kualitas lulusan, penggunaan dana dan hasil-hasil riset melalui manajemen yang dapat dipertanggungjawabkan.

Akuntabilitas adalah bentuk rasa tanggung jawab, tanggung gugat dan tanggung urai dari seseorang atau sebuah lembaga. Akuntabilitas Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS) tidak hanya kepada pemerintah, tetapi juga kepada masyarakat terutama kepada mahasiswa dan orang tua sebagai pelanggan utama. Selebihnya juga PTAIS harus bertanggung jawab kepada pengguna lulusan, asosiasi, dunia profesi beserta asosiasinya dan para ilmuwan di seluruh dunia. Pada dasarnya PTAIS juga usaha layanan jasa. Jasa adalah layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Sementara, jasa pendidikan mempunyai ciri khusus yaitu; (a) dapat diukur misalnya layanan adminitrasinya; (b) tidak dapat diukur (misalnya kualitas pendidikan, di sini ada andil dari peserta didik); dan (c) prestasi yang diberikan oleh lembaga pendidikan yang sebenarnya berupa 'upaya' atau 'proses' bukan hasil. Dengan demikian, pengelola Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta hendaknya sadar bahwa setiap saat harus selalu membuktikan bahwa dirinya telah melaksanakan manajemen dengan baik, berkinerja yang baik berdasarkan regulasi yang ada. Di sini akuntabilitas merupakan tanggung jawab sekaligus tanggung gugat atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misinya dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Ketika sebuah Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta telah beroperasi maka sebenarnya ia telah melakukan transaksi dengan konsumen dalam hal ini mahasiswa dan orang tua serta masyarakat pada umumnya. Bentuk transaksi ini dapat ditemukan dalam tiga tahap; 1) transaksi dalam tahap awal yaitu berupa iklan, brosur, seleksi penerimaan; 2) transaksi dalam tahap utama berupa proses administrasi dan belajar mengajar; 3) transaksi dalam tahap produk yaitu berupa lulusan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) maka setiap penyelenggara perguruan tinggi wajib mewaspadai kinerjanya. Karena pada gilirannya apabila masyarakat konsumen/pengguna usaha jasa perguruan tinggi telah sadar akan hak-haknya, tidak mustahil akan terjadi banyak gugatan dan tuntutan kepada perguruan tinggi yang melakukan "mal praktik".

Akuntabilitas kepada pemerintah berhubungan dengan tingkat kesesuaian pelaksanaan pendidikan di suatu perguruan tinggi dengan syarat-syarat yang diadakan pemerintah. PTAIS juga memerlukan akuntabilitas dalam hal penggunaan dana dan laporan tiap tahun yang diaudit oleh akuntan publik. Ini

merupakan keharusan agar terjamin kepercayaan publik yang tinggi. Akuntabilitas PTAIS kepada dunia profesi bertujuan melanggengkan pengertian, kecakapan dan keterampilan bidang keilmuan. Secara filosofis PTAIS pun harus bertanggungjawab secara moral dan spiritual atas segala aktivitasnya dengan menunjukkan integritasnya dan memastikan diri dalam meningkatkan martabat umat manusia pada umumnya.

Untuk mewujudkan *international qualivied Islamic higher education*, dalam konteks internasionalisasi pendidikan di era globalisasi saat ini, PTAIS di Indonesia harus memiliki strategi pengembangan pendidikan tingginya. Hal ini dimaksudkan agar PTAIS di Indonesia mampu berkembang dan maju sesuai dengan kebutuhan global tanpa harus mengorbankan kepentingan-kepentingan nasional. Pandangan futuristik tersebut merupakan sesuatu hal yang wajar mengingat internasionalisasi pendidikan tinggi di era globalisasi atau liberalisasi bermediasi melalui jalur pasar bebas yang sangat mungkin tidak hanya memberikan harapan untuk semakin *survive*, tetapi juga ancaman untuk semakin menghancurkan roda pendidikan tinggi suatu negara, apalagi perangkat infrastruktur PTAIS di Indonesia masih jauh dari harapan. Jika ini tidak diantisipasi maka bukan kemajuan yang diperoleh, tetapi justru nasib yang mengharuskan ia "gulung tikar". Kesiapan mental internal PTAIS serta dukungan kebijakan pendidikan nasional yang antisipatif dalam merancang kebijakan di sektornya menjadi faktor penentu langgengnya suatu PTAIS.

Robertson mengatakan bahwa internasionalisasi dalam pendidikan merupakan upaya penyiapan diri dari suatu negara agar ia dapat meraih kejayaan peradaban. Namun demikian internasionalisasi pendidikan jika tidak dikelola dengan baik bisa menjerumuskan negara ke dalam lembah kehancuran (Ward, 2000: 14). Dalam konteks itulah, upaya strategis peningkatan mutu di PTAIS yakni dengan adanya perbaikan manajemen mutu Sistem Pendidikan Tinggi Agama Swasta segera dilakukan secara simultan dan kontinyu. Manajemen penjaminan mutu pendidikan tinggi harus berorientasi pada pengembangan *international quality academics* (mutu akademis berskala internasional). Bagaimanapun juga kompetisi pendidikan tinggi di era pasar bebas menuntut adanya standar mutu pendidikan yang lebih baik, yang mampu masuk ke segmen Negara mana pun karena adanya *global agreement standar* yang memungkinkan hal itu terjadi, termasuk bagi negara berkembang seperti Indonesia. Manajemen sistem pendidikan yang lebih baik tersebut akan mendorong tumbuh dan berkembangnya SDM yang akan dihasilkan oleh PTAIS di masa yang akan datang, sekaligus membantu memosisikan Indonesia dalam berbagai tingkat kompetisi, baik regional maupun internasional menjadi semakin baik. Tentunya kebijakan perbaikan manajemen sistem pendidikan tinggi tersebut tetap harus mempertimbangkan potensi daerah di mana PTAI tersebut berada.

Dengan paradigma *think locally act globally*, PTAIS di Indonesia diharapkan mampu mengakomodir perkembangan seluruh potensi yang ada,

baik daerah, nasional maupun internasional dengan selalu berpijak pada *Islamic values morality* sebagai basis aplikasi pendidikan tingginya. Upaya penguatan manajemen mutu sistem Pendidikan Tinggi Agama Islam Swasta di Indonesia perlu didukung oleh beberapa hal yaitu;

1. Implementasi penjaminan mutu dan akreditasi dengan skala regional dan internasional. Kebijakan ini perlu dilakukan jika PTAIS di Indonesia benar-benar ingin bertahan dalam arena kompetisi di era globalisasi. Kebijakan itu harus diiringi dengan *spirit of competitiveness* dengan menyiapkan SDM dan infrastruktur PTAIS yang lebih baik. Upaya itu dapat dilakukan misalnya melalui kerjasama dengan badan jaringan perguruan tinggi regional seperti *Southeast Asia Ministry of Education Organization* (SEMEO) untuk mendorong realisasi akreditasi tingkat regional. Setelah upaya akreditasi regional dapat berjalan dengan baik, transisi ke arah akreditasi internasional sebagai prasyarat untuk memperlebar akses ke masyarakat internasional tidak akan sulit.
2. Otonomi pengelolaan pendidikan tinggi yang lebih matang dengan tetap memberdayakan potensi daerah. Hal ini dimaksudkan agar PTAIS di daerah mampu secara lebih leluasa mengelola lembaga pendidikan tingginya sesuai dengan potensi daerah serta peluang penyesuaian potensi yang ada dengan potensi internasional yang dapat dikembangkan melalui *international academic networking*, sehingga akan lebih mampu menyokong kiprah PTAIS yang ada untuk bekerja dan menyiapkan segala sesuatunya secara lebih optimal. Hal ini diasumsikan karena PTAIS di Indonesia secara keseluruhan memiliki karakteristik yang berbeda, baik negeri maupun swasta dan memiliki potensi daerah yang berbeda pula, serta problematika sekaligus *problem solving* yang tentunya sangat bervariasi. Oleh karena itu kebijakan otonomi kampus menjadi prasyarat yang mutlak harus dilakukan, yang tentunya tetap mempertimbangkan kepentingan nasional dengan selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
3. Akuntabilitas aplikasi Pendidikan Tinggi Islam Swasta yang didukung oleh seluruh *stakeholder*. Akuntabilitas menjadi salah satu kunci sukses aplikasi pendidikan tinggi karena di dalamnya adanya jaminan akan keterbukaan dalam pengelolaan perguruan tinggi. Dengan adanya akuntabilitas, pendidikan tinggi Islam akan mampu mengikuti percepatan perkembangan dunia pendidikan. Ada *positive feedback* dari seluruh *stakeholder* untuk bersama-sama memajukan PTAI di mana mereka saling berkepentingan. (Jalal dan Supriadi, 2001: 105-17).
4. Kompetensi sumber daya infrastruktur dan SDM PTAIS semakin ditingkatkan melalui kebijakan *resources improving* yang

berkelanjutan. Kebijakan ini perlu dilakukan melalui berbagai upaya, baik internal maupun eksternal. Manakala PTAIS yang bersangkutan tidak memiliki sumber dana yang cukup untuk program itu, dapat disiasati dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang konsen terhadap pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan, baik swasta maupun negeri yang tentunya berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Kebijakan itu perlu dikedepankan karena eksistensi sebuah organisasi di masa depan tidak hanya ditentukan oleh internal sivitasnya saja, tetapi oleh faktor eksternalnya juga (Mc Rae, 1995: 79).

Aplikasi manajemen mutu harus didukung oleh *good academic atmosphere* sehingga upaya peningkatan mutu akademik dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Kondisi atmosfer akademis yang baik akan lahir manakala didukung oleh kesadaran holistik seluruh sivitas akademika akan tingkat urgensi mutu pendidikan tinggi Islamnya. Upaya ini dapat dilakukan melalui pengembangan budaya akademis yang lebih sehat dan kondusif dengan mengajak seluruh sivitas akademika yang ada untuk bersama-sama meningkatkan proses pembelajaran dan pendidikan yang lebih baik berdasarkan komitmen mutu yang diinginkan dan diharapkan oleh semua sivitas yang ada.

Dalam rangka internasionalisasi pendidikan tinggi Islam yang lebih humanis dan *international academic networking* yang luas untuk mendukung SDM dalam negeri menjadi lebih unggul, inovatif dan produktif menjadi suatu keniscayaan sehingga ke depan PTAIS dapat mereduksi pengangguran sekaligus menciptakan lulusan (*output*) yang kompetitif dalam berbagai skala kompetisi. Rasa kemanusiaan serta *diversity understanding* (pemahaman akan pluralitas) dalam dunia akademis mutlak diperlukan, agar pendidikan tinggi nantinya tidak hanya berorientasi pada materialisme, yang didominasi oleh kelas atas, tetapi juga memiliki sensitivitas terhadap pentingnya pengembangan sumber daya manusia masa depan yang potensial walaupun dari struktur ekonomi yang kurang mampu. Artinya ada peluang untuk memperoleh kesamaan pendidikan yang baik (*equality for getting good education access*) bagi putera-puteri negeri tercinta ini sebagai manifestasi calon pemimpin masa depan.

Dengan dukungan perangkat manajemen mutu sistem pendidikan tinggi Islam yang lebih baik serta strategi pengembangan pendidikan tinggi yang matang dan tepat, PTAIS di Indonesia akan memiliki prospek yang baik dalam berkompetisi tidak hanya di level nasional dan regional, tetapi juga di level internasional. Di samping itu juga, setidaknya PTAIS di Indonesia akan memperoleh sejumlah *academic profits*, seperti halnya; semakin kokohnya kiprah dan eksistensi PTAIS di tengah kompetisi global, semakin luasnya

international networking yang dimiliki sebagai basis pengembangan akademik dan sosial PTAIS kepada masyarakat dan sivitas akademiknya, serta meningkatnya mutu produk pendidikan tingginya yang diharapkan tidak hanya kompetitif dan produktif di berbagai level kompetisi, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan kultural kepada masyarakatnya sehingga ke depan diharapkan akan mampu mendukung kemajuan bangsa dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan kata lain, PTAIS di Indonesia mampu mencetak *out put* (lulusan) guna *to preservational identity, to sustain and develop the intellectual and cultural base of the society, to give inspiration and pride to citizens, and to promote dialogue for respect of cultural and social diversity*.

Upaya pengembangan dan peningkatan manajemen mutu sistem pendidikan tinggi Islam bagi PTAIS di Indonesia dengan pendekatan *triple quality* yang dikembangkan oleh Juran, yang terkenal dengan konsep *Juran's Trilogy*, (Sallis, 2001: 67-68) yang mencakup 3 komponen utama, yaitu;

1. *Quality Planning* (Perencanaan Mutu). Perencanaan mutu merupakan tahapan untuk menentukan dan merancang segala perangkat pendidikan tinggi, baik infrastruktur maupun lainnya seperti misi, visi, program, kebijakan, serta sketsa tahapan proses yang akan dilalui untuk dirancang secara lebih matang dan komprehensif agar mampu menghasilkan pendidikan tinggi Islam yang lebih kompetitif dan produktif berdasarkan nilai-nilai keislaman sebagai landasan aplikasinya. Aspek *quality planning* menjadi penting dilakukan karena perkembangan PTAIS pada dasarnya juga menyesuaikan diri dari perkembangan masyarakat termasuk masyarakat global. Dengan kata lain, kebijakan yang dirancang adalah manifestasi dari kebutuhan dan keinginan masyarakat (*social need and desire*);
2. *Quality Control* (Pengendalian Mutu). Tahapan ini juga penting karena pengendalian mutu pada dasarnya merupakan jaminan mutu yang ingin dihasilkan. Dengan adanya *quality control*, PTAIS dapat memastikan proses implementasi manajemen pendidikan tingginya dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan perencanaan semula, baik menyangkut program pendidikan yang dijalankan, kurikulum, perangkat infrastruktur pendidikan tinggi, SDM, *out put* yang dirancang, maupun tingkat akselerasinya terhadap kompetisi dunia pendidikan tinggi dan dunia kerja agar tetap eksis dan *survive*.
3. *Quality Improvement* (Peningkatan Mutu). Tahapan ini merupakan upaya tindak lanjut dari proses pelaksanaan mutu di mana seluruh rencana akademis PTAIS yang telah dilaksanakan dievaluasi untuk kemudian dilakukan pembenahan secara simultan dan komprehensif guna memperbaiki kelemahan yang terjadi sebelumnya. Dengan peningkatan mutu berkelanjutan, eksistensi PTAIS di Indonesia akan lebih *appreciable* terhadap kebutuhan dan

perkembangan masyarakat global. Hal ini juga dapat diartikan bahwa pengelolaan program pendidikan tinggi Islam dalam konteks internasionalisasi pendidikan sudah saatnya memperhitungkan standar mutu sebagai basis peningkatan akselerasi *equality access* untuk bersaing berbagai tingkat kompetensi.

SIMPULAN

Strategi pengembangan mutu sistem Pendidikan Tinggi Islam Swasta setidaknya harus; 1) berorientasi pada pengembangan mutu akademik berskala internasional, sehingga *academic and social needs* untuk skala nasional dan regional sudah secara otomatis mampu dipenuhi. Penguatan manajemen itu harus didukung oleh; (a) implementasi akreditasi dengan skala regional dan internasional, (b) otonomi pengelolaan pendidikan tinggi yang lebih matang, (c) akuntabilitas aplikasi pendidikan tinggi Islam yang didukung oleh seluruh *stakeholder*, sehingga seluruh pihak dapat berpartisipasi secara aktif untuk terus membenahi dan mengevaluasi *quality improvement* di PTAIS yang ada, (d) kompetensi sumber daya infrastruktur dan SDM PTAIS semakin ditingkatkan melalui kebijakan *resources improving* yang berkelanjutan; 2) aplikasi manajemen mutu harus didukung oleh *good academic atmosphere* sehingga upaya peningkatan mutu akademik dapat berjalan lebih cepat dan efektif; 3) *humanistic sense of diversity* harus menjadi *primary supporting* PTAIS dalam rangka internasionalisasi pendidikan Islam yang lebih humanis dan *international academic networking* yang luas untuk mendukung SDM dalam negeri menjadi lebih unggul, inovatif dan produktif menjadi suatu keniscayaan sehingga ke depan PTAIS dapat mereduksi pengangguran sekaligus menciptakan lulusan (*row output*) yang kompetitif dalam berbagai bidang. Internasionalisasi pendidikan tinggi ke depan bukanlah suatu ironi. Tetapi realitas kekinian yang sudah semakin mengarahkan *probability* itu menjadi suatu kenyataan. Namun, Indonesia yang didukung oleh PTAIS yang begitu besar haruslah menyiapkan perangkat kompetitif pendidikan tinggi Islam sedini mungkin sehingga ke depan PTAIS di Indonesia memiliki *good governance system* pendidikan tinggi yang unggul sehingga mampu berkompetisi di level internasional tanpa kehilangan *Islamic morality character* sebagai dasar aplikasinya. Dengan *academic support* yang lebih *seattle* (mapan) terutama di bidang infrastruktur pendidikan tingginya, prospek Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia, baik swasta maupun negeri dalam konteks internasionalisasi pendidikan akan mampu eksis dan *survive* dalam kompetisi internasional di era globalisasi saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi. 2002. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional, Rekonstruksi dan Demokratisasi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Daulay, Putra, Haidar. 2004. *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional di*

- Indonesia. Jakarta: Prenada Media,
- Daulay, Putra, Haidar. 2007. *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia* Jakarta: Prenada Media,
- Fadjar, A. Malik. 2005. *Holistika Pemikiran Pendidikan*. Jakarta: PT. RadjaGrafindo.
- Furchan, Arief. 2005. *Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi di PTAI* Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Jalal, Fasli dan Supriadi, Dedi. 2001. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Depdiknas – Bappenas - Adicita.
- Mas'ud, Abdurrahman dkk. 2001. *Paradigma Pendidikan Islam*. Pustaka Pelajar dan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo: Semarang.
- McRae, Hamish. 1995. *Dunia Di Tahun 2020*, Jakarta: Binarupa Aksara
- Mulyasa, E. 2007. *Pengantar Matrikulasi Program Beasiswa Doktor (S3) Manajemen Pendidikan di UNINUS Bandung*, Agustus. Tidak diterbitkan
- Rivan, Ahmad. 2005. *Strategi dan Prospek Pengembangan Mutu Lulusan PTAI di Indonesia*. Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, 23 Mei 2005.
- Rochaety, Eti. 2005. *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Kreasindo Medicita.
- Sallis, Edward. 2004. *Manajemen Kualitas Total Dalam Pendidikan (Total Quality Management in Education)* Penerjemah: Kambey Daniel C., Manado: Program Pascasarjana Universitas Negeri Manado.
- Sufyarma. 2004. *Kapita Selektta Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto. 2001. *Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah: strategi Pendidikan Nasional dalam era Globalisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Uhamka Ekspres.
- Tilaar, H.A.R. 2002. *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Ward, James. 2000. *Reclaiming International Mindset of Education in Global Era*. Penguin Book: USA.
- Yunus, Mahmud. 1979. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* Jakarta: Mutiara.